

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang dapat memberikan dampak positif yaitu mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk di suatu negara dalam tujuan peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita. Pembangunan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang keberadaan masyarakat yang lebih adil dan usaha peningkatan sumber daya manusia (Lahuddin, 2020). Pembangunan diawali dengan proses peningkatan pendapatan masyarakat dengan artian bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terpenting bagi pembangunan (Nurlina & Ginting, 2018). Pelaksanaan proses pembangunan dilakukan pemerintah sebagai penanggungjawab atas daerahnya dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemaksimalan potensi setiap daerah. Proses pembangunan tersebut dilaksanakan sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang baik secara berkesinambungan, sehingga memperoleh kondisi yang semakin baik (Soares *et al.*, 2017).

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah memiliki keterkaitan peran yang sangat kuat antara satu sama lain. Kedua pembangunan tersebut memiliki peran masing-masing yaitu sebagai pendorong keberhasilan satu sama lain. Keberhasilan pembangunan daerah terjadi karena adanya dorongan pembangunan nasional sehingga menjadikan pembangunan daerah dapat berkembang. Pembangunan daerah juga memiliki peran terhadap pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai faktor pendukung kedinamisan sistem perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menumbuhkan daya tarik investasi secara alami meliputi pemenuhan ketersediaan sarana prasarana, transportasi, kelembagaan sosial, dan komunikasi (Nurlina & Ginting, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara terus menerus menuju kondisi yang lebih baik selama periode waktu tertentu (Gulo, 2015). Dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator kesuksesan negara dalam pembangunan ekonomi. Jadi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, walaupun ada indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melakukan pengembangan wilayah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan wilayah suatu negara secara merata (Fudhail *et al.*, 2021).

Penetapan kota atau wilayah tertentu menjadi pusat-pusat pertumbuhan dilakukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut (Nurlina & Ginting, 2018). Pusat pertumbuhan (*growth pole*) bisa didefinisikan melalui dua cara yaitu secara fungsional dan geografis (Fudhail *et al.*, 2021). Definisi pusat pertumbuhan secara fungsional adalah tempat pemusatan kelompok-kelompok usaha atau cabang-cabang industri yang karena keterkaitannya mempunyai unsur-unsur dinamis untuk mensimulasikan kehidupan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Dilihat secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu tempat yang mempunyai banyak fasilitas dan pelayanan, sehingga dijadikan sebagai pusat daya tarik (*pole of attraction*). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan secara fungsional adalah tempat yang terfokuskan pada kumpulan usaha atau cabang industri yang berbeda, yang bersama-sama memiliki hubungan yang harmonis untuk mendirikan atau merevitalisasi perusahaan itu sendiri. Kemudian pertumbuhan secara geografis yaitu menjadi pusat daya tarik untuk berbagai kelompok masyarakat yang berada di tempat atau daerah tersebut (Arumpaka Priangga, 2018).

Pertumbuhan sebuah kota atau wilayah dipengaruhi oleh fungsi utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu fungsi sosial-ekonomi. Pemerintah harus bisa memberikan pelayanan kepada daerah *hinterland*.

Daerah *hinterland* didefinisikan menjadi 3 artian yaitu pertama sebagai wilayah pedesaan atau perkotaan atau keduanya yang terkait erat secara ekonomi dengan kota terdekat. Kedua, daerah *hinterland* diartikan sebagai daerah wilayah pedalaman, wilayah terpencil dari daerah perkotaan dan wilayah sekitar pusat-pusat kota. Ketiga, daerah *hinterland* diartikan sebagai wilayah belakang dan wilayah pengaruh sebuah kota yang dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya cenderung bergantung pada kota tersebut.

Pelayanan tersebut juga dilakukan melalui pusat kota kepada daerah-daerah belakangnya yang memiliki hubungan kuat. Kota yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk kota biasanya disebut dengan fungsi kota, yang seringkali dihubungkan dengan sosial-ekonomi pokok suatu kota. Fungsi kota dapat dilihat melalui kelengkapan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dipunyai, selain itu dilihat dari segi akses jalan yang dimiliki oleh suatu kota ke kota-kota lainnya atau daerah *hinterland*nya. Model ideal diharapkan dapat terbentuk, dengan asumsi serupa mengenai bentuk medan, tingkat penduduk, kualitas tanah, dan budayanya. Christaller menjelaskan bentuk model pelayanan yaitu jejaring segi enam atau *hexagonal*. Bentuk model pelayanan *hexagonal* tersebut secara teoritis dapat menghasilkan peningkatan kemampuan administrasi, pemasaran, dan transportasi (Alwi *et al.*, 2020).

Daerah pusat pertumbuhan diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap perkembangan kawasan yang berada di sekitarnya (*hinterland*) (Lahuddin, 2020). Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan dampak positif dari adanya kawasan pusat-pusat pertumbuhan yaitu pada daerah pusat pertumbuhan dijadikan sebuah alat untuk memudahkan pengambilan kebijakan dalam kegiatan penetapan suatu wilayah pembangunan (Diartho & Pratama, 2018). Penetapan pusat-pusat pertumbuhan berfungsi untuk masalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dalam garis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lahuddin, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kedaulatan untuk menata daerah otonom. Tujuan penataan daerah otonom tersebut yaitu agar pengembangan di tiap wilayah dapat tumbuh secara merata tidak ada kesenjangan antar wilayah. Kemampuan sumber daya yang dimiliki dijadikan alat untuk melakukan mekanisme pembangunan dan pengembangan suatu wilayah, sehingga pemerintah di sini mengemban tanggungjawab yang cukup besar. Dalam mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki, mereka dianggap lebih mengetahui dan berpengalaman mengenai daerah masing-masing. Pada daerah otonom diharapkan terus berusaha dalam upaya pengoptimalan segala sumberdaya wilayah yang dimiliki agar dapat berfungsi sebagai daya pokok pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Diartho & Pratama, 2018).

Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh dampak penetesan ke bawah dan dampak penyebaran melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dengan basis sumberdaya di wilayah pedesaan, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh. Dua atau lebih wilayah yang berdekatan, meskipun secara administratif terpisah, dikatakan saling menguntungkan dalam bentuk sinergi dan pertumbuhan interaktif. Pusat-pusat pertumbuhan yang didirikan di berbagai daerah juga diharapkan dapat memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) ke daerah-daerah tertinggal daripada efek pengutuban yang dapat menyedot sumber daya dari daerah-daerah tertinggal. Dalam distribusi spasial ekonomi, kekuatan pasar akan tetap dijaga keseimbangannya. Selain itu, efek kejatuhan atau proses *low center* akan otomatis terjadi jika kesejahteraan di wilayah perkotaan dapat tercapai yang dilakukan dari tingkat tinggi seperti perkotaan ke wilayah yang lebih rendah seperti daerah *hinterland*, kawasan dan pedesaan melalui berbagai mekanisme yaitu hierarki perkotaan dan penciptaan perusahaan besar (Irsyad & Syahnur, 2018).

Pengembangan pusat pertumbuhan berfungsi untuk menggiatkan pola tata kawasan daerah dan pola interaksi antar daerah serta dapat pemererat sistem yang sudah dilakukan dalam upaya efisiensi pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah masing-masing (Diartho & Pratama, 2018). Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ini, tidak terlepas dari interaksi spasial antar wilayah. Keberhasilan suatu model pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah dipengaruhi oleh interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya. Strategi pembangunan dengan menetapkan suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Wilayah yang dijadikan pusat pertumbuhan diharapkan dapat menjalankan pembangunan perekonomian ke wilayah jangkauannya (Irsyad & Syahnur, 2018).

Interaksi spasial didefinisikan sebagai suatu hubungan berbalas yang saling mempengaruhi antar dua atau lebih suatu wilayah yang dapat menumbuhkan gejala, permasalahan baru, dan kenampakan akibat dari perhitungan lokasi atau wilayah dalam analisis ekonomi regional dan interaksi yang terjadi diantara keduanya mampu mempengaruhi kecepatan pembangunan wilayah yang bersangkutan (Emalia & Farida, 2018). Definisi interaksi spasial diartikan sebagai pergerakan barang, orang dan informasi yang terjadi antara daerah asal dengan daerah tujuan berupa arus antar lokasi yang melewati tempat geografis. Agar memudahkan penentuan prioritas kekuatan interaksi antar wilayah dilihat dari intensitas interaksi spasial antara wilayah pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (*hinterland*) dapat dicari menggunakan indeks gravitasi. Kemudian hasil dari indeks gravitasi tersebut diberikan nilai dengan skala ordinal (Irsyad & Syahnur, 2018).

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi yang pesat yang tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan menimbulkan masalah ketimpangan wilayah (Soares *et al.*, 2017). Dampak dari ketimpangan tersebut adalah adanya daerah maju dan daerah tertinggal (Salmah *et al.*, 2020). Adanya daerah tertinggal diakibatkan oleh adanya pemusatan aktivitas ekonomi di sebuah wilayah, di mana ekonomi di daerah dengan tingginya kegiatan ekonomi yang

difokuskan melaju dengan cepat (Abdullah *et al.*, 2021). Ketimpangan ini juga disebabkan oleh minimnya kelembagaan perencanaan pembangunan di masing-masing daerah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) diikuti oleh ketimpangan laju pertumbuhan penduduk dan perbedaan struktur ekonomi (Soares *et al.*, 2017).

Ketimpangan pembangunan antar daerah terlihat pada kesenjangan kualitas sumber daya manusia, pendapatan per kapita, akses perbankan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Ketimpangan wilayah ditandai dengan perbedaan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial penduduk. Kegiatan masyarakat ini tergantung pada ketersediaan fasilitas penunjang ekonomi (seperti pasar dan bank), fasilitas sosial (rumah sakit, sekolah dan lain-lain), sarana dan prasarana administrasi pemerintahan (seperti transportasi, jalan dan lainnya). Dengan demikian, keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas menentukan tingkat pelayanan yang dapat diakses untuk menentukan kesejahteraan masyarakat (Soares *et al.*, 2017).

Ketimpangan dalam pembangunan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut yaitu dapat mendorong daerah tertinggal untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang tinggi yaitu terjadinya pemborosan ekonomi, melemahnya stabilitas dan solidaritas sosial, serta tingginya ketimpangan secara umum yang dianggap tidak adil. Permasalahan ini di akibatkan dari kegiatan pendistribusian hasil pembangunan yang diberikan kepada seluruh lapisan baik pada masyarakat maupun wilayah tidak merata. Jika tidak mampu dihilangkan maka akan membuat krisis yang lebih rumit mengenai masalah ekonomi, kependudukan, politik, lingkungan, sosial, dan dalam konteks makro akan membuat kerugian terhadap mekanisme dan hasil pembangunan suatu wilayah yang ingin dicapai. Perlu adanya usaha pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut dengan melakukan kesetaraan pembangunan wilayah dan sektoral (Soares *et al.*, 2017).

Alokasi penyebaran fasilitas pelayanan publik merupakan peranan dari tata ruang wilayah. Ketersediaan fasilitas publik tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dapat digunakan sebagai indikator pencapaian pemerataan sosial, sehingga terjadinya pemenuhan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Ketimpangan kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat diukur menggunakan jumlah dan jenis fungsi-fungsi produktif dan sosial yang berada di suatu wilayah (Diartho & Pratama, 2018). Ketimpangan pertumbuhan antar daerah yang terjadi di negara-negara berkembang dapat diindikasikan secara luas melalui adanya perbedaan-perbedaan akses terhadap jasa sosial dan aktifitas produktif. Ketersediaan fasilitas di tiap daerah sangat penting keberadaannya dalam proses pembangunan dan konsistensi perekonomian pada suatu wilayah. Pemerataan pembangunan harus dilakukan melalui pemenuhan dukungan kepentingan umum masyarakat sehari-hari seperti melakukan pemerataan ketersediaan fasilitas umum. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat berkegiatan positif untuk kelangsungan hidup mereka (Alwi *et al.*, 2020).

Fasilitas-fasilitas umum adalah alat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin lengkapnya ketersediaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di suatu tempat menandakan semakin kuat juga daya tarik untuk mengundang masyarakat. Masyarakat dapat berkegiatan produktif dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain itu dengan ketersediaan fasilitas di daerah mereka juga dapat menambah relasi sehingga masyarakat akan sering mendatangi tempat tersebut. Dalam peningkatan pembangunan daerah, pemerintah harus membuat cara agar kota sebagai sentra pertumbuhan dan sentra pelayanan memiliki kontribusi yang kuat dalam upaya peningkatan pembangunan tersebut (Alwi *et al.*, 2020).

Kota atau wilayah sebagai sentra pertumbuhan daerah berperan sebagai sentra akumulasi ekonomi yang menekan tumbuhnya kekuatan ke depan dan ke belakang diantara titik sentra dan wilayah *hinterland*nya dalam upaya menjaga kesinambungan hidup masyarakat dan aktivitas fungsional daerah atau wilayah. Pusat pelayanan yang lebih besar dengan wilayah pedesaan

dihubungkan oleh pusat pelayanan yang lebih kecil. Korelasi pengembangan antara pusat-pusat pelayanan yang dilakukan dalam rencana pembangunan regional tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat, tetapi juga digunakan untuk menghapus atau membatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan (Alwi *et al.*, 2020).

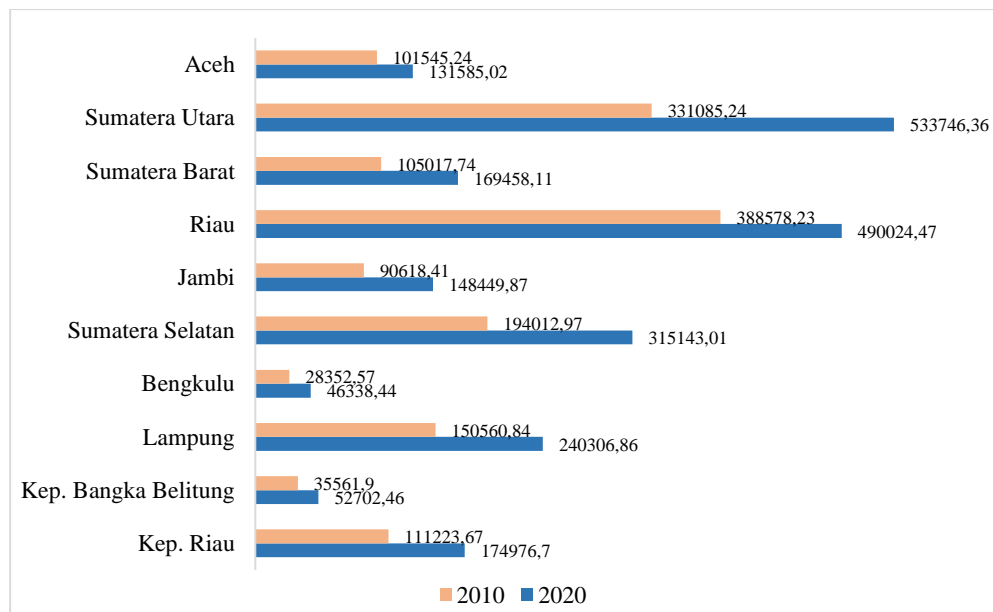
Dengan semakin meningkatnya mobilitas penduduk, berkembangnya infrastruktur dan teknologi informasi berbagai transaksi ekonomi antar daerah menjadi semakin mudah. Barang dan jasa bisa keluar masuk dengan mudah di suatu wilayah kabupaten atau kota. Hal yang sama berlaku untuk pendapatan, teknologi, migrasi tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja bukan hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga dapat berasal dari daerah sekitar. Masuknya faktor-faktor produksi dari daerah lain ke daerah tujuan menunjukkan bahwa daerah-daerah selalu saling memiliki ketergantungan. Ketergantungan ini pada akhirnya menyelesaikan interaksi antar wilayah atau yang biasa disebut dengan interaksi spasial (Heryanti, 2014).

Manfaat bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan layanan adalah bahwa mereka dapat membantu menentukan kabupaten mana yang merupakan pusat bisnis dan utilitas yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendirikan pusat pertumbuhan di suatu daerah. Dengan penetapan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil *trickling down effect* dan *spread effect* sedemikian rupa sehingga memberikan efek positif bagi lingkungan pertumbuhan (Diartho & Pratama, 2018).

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayahnya sekitar 443.065,8 km² dan merupakan pulau dengan perkembangan ekonomi terpesat kedua setelah Pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang cukup pesat ini didukung oleh sumber daya alam wilayahnya yang melimpah serta lokasinya yang strategis. Dalam lingkup nasional, Pulau Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Secara geografis, dalam lingkup regional ASEAN, wilayah Pulau Sumatera

menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk negara-negara yang berada di ASEAN. Dalam lingkup global secara geostrategis, wilayah Pulau Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional untuk mencapai pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia. Di Pulau Sumatera infrastruktur yang ada masih kurang memadai untuk pengembangan industri (Badan Pusat Statistik, 2022).

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dijadikan acuan di tingkat makro adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional dapat dilihat pada berbagai sektor yang aktif dan dapat menawarkan tingkat produksi yang tinggi kepada wilayah tersebut. Dengan harapan dapat memberikan efek yang luas (*spread effect*) dan beberapa efek (*multiple effect*) di sektor lain dan di wilayah atau wilayah yang lebih luas. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, maka semakin baik pula kegiatan ekonominya (Lahuddin, 2020). Berikut ini merupakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterima tiap-tiap provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010 dan 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

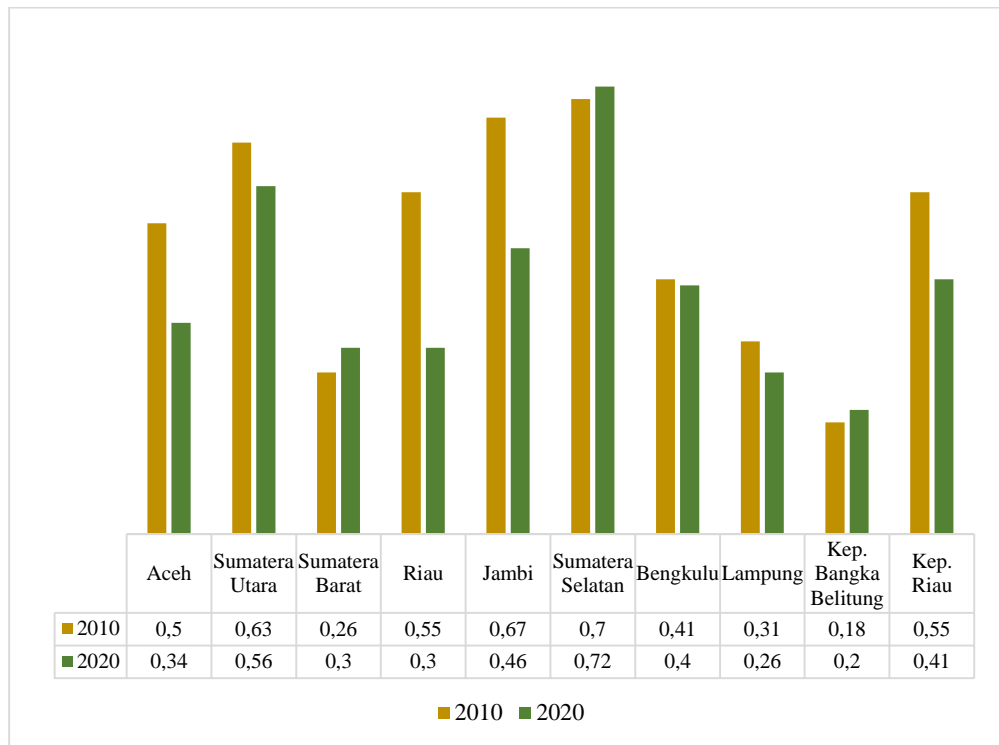
Gambar 1. Produk Domestik Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020 (Miliar Rupiah)

Dilihat dari data PDRB tahun 2010 dan 2020 diatas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki persamaaan pada peringkat yang tinggi dengan menduduki peringkat ketiga penerimaan pendapatan daerah diantara provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingginya jumlah nilai tambah bruto yang diberikan oleh sektor perekonomian daerah.

Perbedaan nilai dan pertumbuhan PDRB dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dikarenakan adanya kegiatan ekonomi cenderung menentukan penargetan sektor-sektor tertentu dan juga sangat bergantung pada potensi daerah yang terkena (Salmah *et al.*, 2020). Ketimpangan antar daerah menjadi penyebab adanya daerah maju dan tertinggal. Salah satu penyebab keterbelakangan suatu daerah adalah karena terkonsentrasinya kegiatan ekonomi daerah, dimana perekonomian daerah terkonsentrasi pada banyak kegiatan ekonomi dan cenderung berkembang pesat. Ketersediaan kelengkapan infrastruktur akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila suatu daerah mampu terhindar dari masalah kesenjangan pendapatan (Abdullah *et al.*, 2021). Ketimpangan wilayah dapat ditentukan melalui indeks Williamson.

Menurut Yusuf (2021) kriteria output yg dipakai dalam indeks Williamson merupakan indeks > 1 adalah ketimpangan sangat tinggi, indeks $0,7 - 1$ adalah ketimpangan tinggi, indeks $0,4 - 0,69$ adalah ketimpangan sedang, dan indeks $< 0,39$ adalah ketimpangan rendah. Berikut ini merupakan data perbandingan Indeks Williamson yang dimiliki tiap-tiap provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010 dan 2020.

Walaupun nilai PDRB nya cukup tinggi tetapi pemerataan pendapatan yang terjadi antar wilayahnya bisa dikatakan masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Permasalahan ini ditunjukkan pada taraf ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi. Indeks Williamson digunakan untuk menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara wilayah atau daerah (Fudhail *et al.*, 2021). Gambar 2 memperlihatkan perbandingan nilai indeks Williamson provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah 2022

Gambar 2. Perbandingan Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 dan 2020

Dilihat dari indeks Williamson tahun 2010 dan 2020 di atas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai ketimpangan tinggi dan mengalami kenaikan dengan selisih angka sebesar 0,02 mencerminkan nilai taraf rendah. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa tingkat distribusi pendapatan yang terjadi antar wilayah kabupaten sangat rendah. Penyebab ketimpangan tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan potensi kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam membangun daerahnya, sehingga terjadi keterbatasan ketersediaan dan jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari perkotaan. Ketimpangan pembangunan di akibatkan dari kegiatan pendistribusian hasil pembangunan yang diberikan kepada seluruh lapisan baik pada masyarakat maupun wilayah tidak merata (Soares *et al.*, 2017). Ketimpangan wilayah yang cukup besar memiliki nilai mendekati 1. Nilai ini menunjukkan distribusi pendapatan yang terjadi di antar

daerah dalam konteks ini antar kabupaten/kota sangat rendah atau terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar (Winarto *et al.*, 2021).

Semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Ketimpangan yang tinggi akan mengakibatkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, memperparah konflik dan menghambat potensi ekonomi pada generasi sekarang dan masa depan. Kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami hambatan sehingga perlu adanya penentuan pusat pertumbuhan melalui perbaikan pemerataan pendistribusian pendapatan di berbagai wilayah (Putra *et al.*, 2017).

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 kabupaten/kota yang meliputi 11 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan 2020. Kabupaten/kota tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau (Badan Pusat Statistik, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan persebaran sarana dan fasilitas umum di tiap kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan 2020, sehingga dapat diketahui kabupaten mana yang cocok dijadikan sebagai daerah pusat pertumbuhan. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana interaksi daerah pusat pertumbuhan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal yang mendasari penelitian ini adalah terjadinya ketimpangan penyebaran infrastruktur publik sehingga diperlukan penelitian tentang identifikasi pusat pertumbuhan dan analisis interaksi spasial perekonomian. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi selanjutnya, sehingga keberhasilan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2, yang menunjukkan terjadinya ketimpangan pendistribusian pendapatan yang cukup signifikan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan 2020. Di sisi lain pada Gambar 1, pada tahun 2010 dan 2020 Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perolehan PDRB yang diterima pemerintah bernilai cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Manakah kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Manakah kabupaten/kota yang memiliki nilai interaksi spasial tertinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi diri dengan melakukan pembahasan hanya berkaitan dengan “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan” pada tahun 2010 dan 2020. Pembatasan tersebut dilakukan agar penelitian dapat dilakukan lebih terarah, terfokus, dan mendalam melalui pembatasan variabel permasalahan dengan dipilih variabel fasilitas umum, jumlah penduduk dan jarak. Menggunakan metode analisis skalogram dan indeks sentralitas, serta analisis gravitasi atau interaksi. Pusat pertumbuhan dan interaksi spasial dipilih karena merupakan sebuah indikator keberhasilan suatu model pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengidentifikasi kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki nilai interaksi spasial tertinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi regional mengenai pemecahan masalah di kabupaten/kota dan peningkatan pembangunan daerah melalui identifikasi pusat pertumbuhan dan analisis interaksi spasial perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan daerah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan, menjadi gambaran dan pengembangan teori penelitian selanjutnya terkait pengidentifikasian pusat pertumbuhan dan analisis interaksi spasial perekonomian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mejadikan gambaran, masukan, dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait pengidentifikasian pusat pertumbuhan dan analisis interaksi spasial perekonomian, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan menyusun sebuah perencanaan, pembangunan wilayah kabupaten (khususnya kabupaten tertinggal), dan sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan pembangunan daerah (terutama daerah kabupaten tertinggal) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya memajukan pembangunan daerah melalui pengidentifikasian pusat pertumbuhan dan penganalisan interaksi spasial perekonomian.